

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

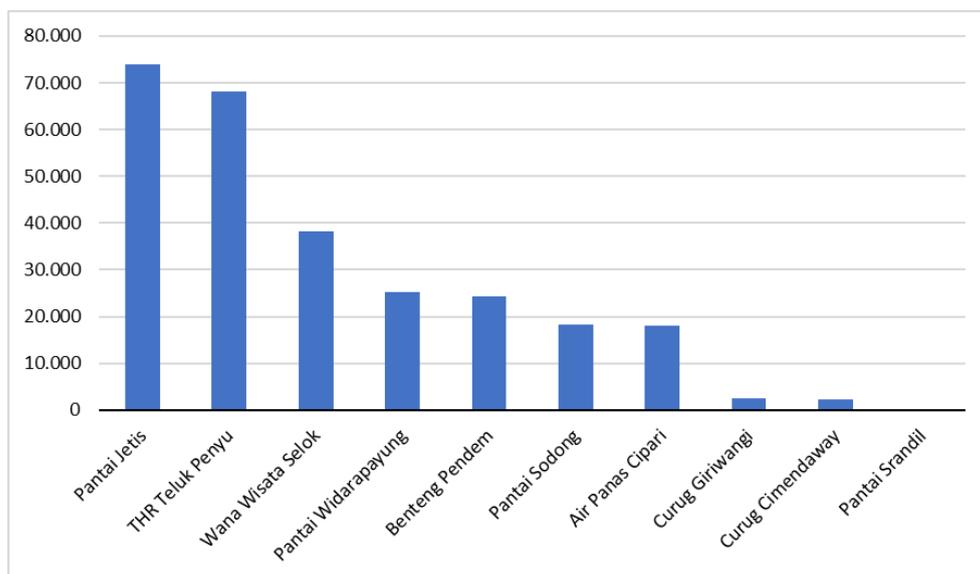
### **1.1 Latar Belakang**

Industri pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata dalam skala desa dapat dikembangkan dalam bentuk desa wisata. Desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam. Setiap komunitas desa harus mengidentifikasi potensi yang dimilikinya dan melaksanakan pengembangannya secara optimal guna menghasilkan dampak positif yang lebih besar serta meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan yang lebih optimal bagi penduduk lokal.

Prinsip dasar dari desa wisata ialah menggabungkan daya tarik wisata dengan infrastruktur, fasilitas, dan gaya hidup lokal masyarakat desa. Untuk mewujudkan ini, penting untuk memperkuat komunikasi dan interaksi antara berbagai aspek di dalam desa wisata. Ini mengharuskan kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai lembaga terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata, termasuk pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak swasta, dan warga lokal. Penyelenggaraan

desa wisata di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) No. 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Desa pariwisata memegang peranan penting untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha serta lapangan kerja yang merata, memanfaatkan potensi ekonomi dan keunikan lokal secara optimal, serta menghargai serta menjaga warisan budaya, keagamaan, tradisional, dan menjaga keberlanjutan lingkungan alam.

**Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisata Mengacu Obyek Wisata di Kabupaten Cilacap Tahun 2021.**



Sumber : Data Pengunjung Obyek Wisata, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.

Data yang disajikan dalam grafik diatas menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan mengacu jumlah pengunjung wisata di

Kabupaten Cilacap. Tercatat sebanyak 73.927 pengunjung yang mengunjungi obyek wisata Pantai Jetis, disusul THR Teluk Penyudengan jumlah 68.058 pengunjung yang datang. Desa wisata sebagai satu di antara obyek pariwisata di Kabupaten Cilacap tidak masuk ke dalam top obyek wisata yang sering dikunjungi, sedangkan pengembangan desa wisata merupakan sasaran dari misi Bupati Kabupaten Cilacap yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Cilacap 2017 - 2022, Misi ke-4 : Melaksanakan pengembangan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional. Dalam misinya, Kabupaten Cilacap bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai langkah, seperti melaksanakan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, menyempurnakan proses perizinan, meningkatkan investasi, memperbaiki klaster industri, dan memperbaiki fasilitas perdagangan. Selain itu, terdapat usaha untuk memanfaatkan serta memberdayakan potensi pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan ekonomi.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Cilacap menjadi bagian tanggung jawab Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kab. Cilacap. DISPORAPAR bertanggung jawab atas pengelolaan dua aspek utama dalam bidang pariwisata, yakni pengembangan destinasi pariwisata serta pemasaran pariwisata juga ekonomi kreatif. Mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, DISPORAPAR Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan tugasnya membantu sebanyak 27 desa wisata. Desa Wisata yang tercatat era ini sudah diresmikan pada SK Bupati Nomor 556/708/27 Tahun 2020.

**Tabel 1. Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Cilacap**

No	Nama Desa Wisata	Alamat
1.	Desa Wisata Karang Banar	Jl. Gatot Subroto No. 14 Desa Jetis Kec. Nusawungu
2.	Desa Wisata Genta Wisata	Jl. Temu Giring No. 4 Desa Gentasari Kec. Kroya
3.	Desa Wisata Wagir Indah	Jl. Satria Desa Welahan Wetan Kec. Adipala
4.	Desa Wisata Samudra Mandiri Sejahtera	Jl. Laut No. 4 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun
5.	Desa Wisata Cimendaway Indah	Desa Datar Kec. Dayeuhluhur
6.	Desa Wisata Curug Geulis	Desa Cisuru Kec. Cipari
7.	Desa Wisata Lewih Manggu	Desa Karanggedang Kec. Sidareja
8.	Desa Wisata Bojong Tirta Indah	Desa Bojongsari Kec. Kedungreja
9.	Desa Wisata Rahayu	Desa Pesanggrahan Kec. Kroya
10.	Desa Wisata Talabunsa	Desa Pamulihan Kec. Karangpucung
11.	Desa Wisata Kumandang Wisata	Kelurahan Kutawaru Kec. Cilacap
13.	Desa Wisata Ekowisata Tambaksari	Desa Tambaksari Kec. Wanareja
14.	Desa Wisata Curug Tonjong Panto	Desa Sadahayu Kec. Majenang

No	Nama Desa Wisata	Alamat
15.	Desa Wisata Alam Lestari Desa Sumpinghayu	Desa Sumpinghayu Kec. Dayeuhluhur
16.	Desa Wisata Kamulyan	Desa Kamulyan Kec. Bantarsari
17.	Desa Wisata Pesona Serayu	Desas Kesugihan Kidul
18.	Desa Wisata Bunton	Desa Bunton Kec. Adipala
19.	Desa Wisata Ekowisata	Desa Bingkeng Kec. Dayeuhluhur
20.	Desa Wisata Salam Sari	Desa Cilempuyang Kec. Cimanggu
21.	Desa Wisata Cipari	Desa Cipari Kec. Cipari
22.	Desa Wisata Karang Sari (rawandelik)	Desa Karang Sari Kec. Adipala
23.	Desa Wisata Padang Bumi Kamulyan	Desa Salebu Kec. Majenang
24.	Desa Wisata Sendang Kencana	Desa Sindangbarang Kec. Karangpucung
25.	Desa Wisata Karangmangu	Desa Karangmangu Kec. Kroya Wanarata
26.	Desa Wisata Mandala Giri	Desa Mandala Kec. Jeruklegi
27.	Desa Wisata Kompas	Desa Pesahangan, Kec. Cimanggu

Sumber : Data Desa Wisata Kabupaten Cilacap

Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” yang berada di Kecamatan Wanareja menjadi satu di antara desa wisata yang sudah diresmikan dalam SK. Kecamatan Wanareja memiliki presentase wilayah terluas dengan angka 8,71% dari wilayah Kabupaten Cilacap. Dilihat dari jaraknya dari pusat pemerintahan kabupaten, Kecamatan Wanareja merupakan

kecamatan yang terletak cukup jauh, menempati posisi kedua setelah Kecamatan Dayeuhluhur seperti ditunjukkan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. Jarak ke Ibukota Kabupaten Mengacu Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Jarak kecamatan ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Dayeuhluhur	105
2.	Wanareja	86
3.	Majenang	86
4.	Cimanggu	76
5.	Karangpucung	60
6.	Cipari	69
7.	Sidareja	54
8.	Kedungreja	57
9.	Patimuan	70
10.	Gandrungmangu	45
11.	Bantarsari	42
12.	Kawunganten	32
13.	Kampung Laut	41
14.	Jeruklegi	16
15.	Kesugihan	17
16.	Adipala	24
17.	Maos	27
18.	Sampang	33
19.	Kroya	32
20.	Binangun	36

No	Nama Kecamatan	Jarak kecamatan ke Ibukota Kabupaten (km)
21.	Nusawungu	46
22.	Cilacap Selatan	14
23.	Cilacap Tengah	4
24.	Cilacap Utara	7

Sumber : Data Kecamatan di Kab. Cilacap dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik

Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” terletak pada 92 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap. Lokasi ini membuat Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” menjadi satu di antara obyek wisata dengan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap. Kecamatan Wanareja memiliki potensi dibidang pariwisata yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 556/708/27 Tahun 2020, yakni Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” yang terletak di Desa Tambaksari, Wanareja. Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” memiliki 5 potensi pariwisata yakni

**Tabel 3. Destinasi Wisata dan Potensi di Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”**

No	Nama Destinasi Wisata	Lokasi
1.	Agro Wisata Cibinuang	Dusun Gunung Geulis
2.	Poencak Lumba	Dusun Tambaksari
3.	Embung Serbaguna Hantapura	Dusun Pakembara

No	Nama Destinasi Wisata	Lokasi
4.	Wisata Religi, Adat dan Sejarah Bale Bandung	Dusun Tangleg

Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi yang terletak di antara 200 - 600 mdpl dengan suasana dingin yang sesuai untuk dikembangkan sebagai pariwisata agro wisata. Sebagai desa wisata berkembang, Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” memiliki 4 destinasi wisata, antara lain Agro Wisata Cibinuang terdapat *camping ground* dan taman wisata hutan pinus. Bale Bandung di Dusun Tangleg memiliki sarana edukasi berupa situs sejarah. Embung Serbaguna Hantapura berupa embung penampung air desa. Destinasi wisata religi, adat dan sejarah disajikan dengan terdapat Makam Dalem Kyai Tanjungsari, Petilasan Terang Peot serta terdapat Lingga. Setiap tanggal 1 Suro (dalam kalender bulan Jawa) di Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” mengadakan perayaan seperti Grebeg tumpeng 1 Suro, Grebeg 1 Suro Gunung Geulis, dan Sedekah Ketupat. Terdapat pusat pendidikan dan edu wisata yang terdiri dari rumah sabutret penghasil kerajinan serabut kelapa, rumah sarung tangan karet, rumah ijuk, rumah aren penghasil makanan khas desa dan oleh - oleh.

Selain jaraknya yang cukup jauh, akses menuju Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” dirasa masih sulit. Mengacu Data Dasar Prasarana Provinsi Jawa Tengah bagian kondisi jalan di Kabupaten Cilacap, ditemukan data mengenai akses jalan menuju Desa Wisata “Ekowisata

Tambaksari” sebagai berikut :

- 1) Jalan Wanareja - Candipura di Kecamatan Wanareja dengan ruas jalan sepanjang 5.600 km teraspal dengan kondisi jalan seluas 4.275 km (76.34%) dalam keadaan baik, 0.447 km (7.98%) dalam kondisi sedang, 0.878 km (15.68%) dalam kondisi rusak ringan.
- 2) Jalan Madura - Tambaksari di Kecamatan Wanareja dengan panjang ruas jalan 5.150 km, dengan 4.122km kondisi jalan sudah teraspal/penetrasi makadam, perkerasan beton 0.703 km dan jalan dengan kondisi telford/kerikil sebanyak 0.325 km ruas jalan. Sepanjang 3.550 km (68.93%) dalam kondisi baik, 0.200 km (3.88%) dalam kondisi sedang, 0.400 km (7.77%) rusak ringan dan 0.325 km (6.30%) dalam kondisi rusak berat.
- 3) Jalan Majingklak - Seukeut di Kecamatan Wanareja dengan panjang ruas jalan 5.600 km, sepanjang 4.368 km (78,00%) dalam kondisi baik, 0.560 km (10.00%) dalam kondisi rusak ringan, 0.672 km (12.00%) dalam kondisi rusak berat.
- 4) Jalan Tambaksari - Seukeut di kecamatan Wanareja dengan ruas 3.800 km panjang jalan, sepanjang 3.602 km sudah teraspal sedang 0.198 km sisanya berupa telford/kerikil. Pada tahun 2022, sepanjang 2.803 km (73,73%) dalam kondisi baik, 0.570 km (15,00%) dalam keadaan sedang, 0.230 km (6.05%) dalam kondisi rusak ringan, 0.198 km (5,22%) dalam kondisi rusak berat.
- 5) Jalan Tenjolaut - Tambaksari di Kecamatan Wanareja dengan ruas

jalan sepanjang 2.800 km, 2.672 km dari ruas jalan sudah teraspal/penetrasi makadam dan 0.128 km dalam kondisi masih berupa telford/kerikil. Pada Tahun 2022 sepanjang 0.872 km (31.14%) dalam kondisi baik, 0.200 km (7.14%) dalam kondisi sedang, 1.600 km (57.14%) dalam keadaan rusak ringan, 0.128km (4.57%) dalam kondisi rusak berat.

### **Gambar 2. Kondisi Jalan Tenjolaut - Tambaksari**



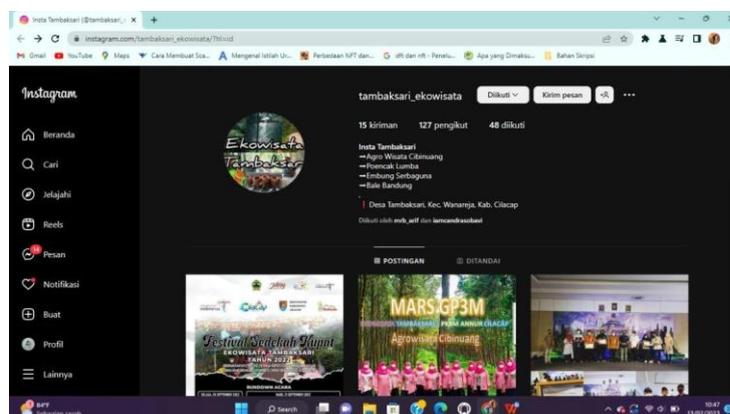
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Mengacu uraian diatas, terdapat indikasi masalah yang ditemukan oleh peneliti. Indikasi masalah pertama ialah akses jalan yang sulit disertai dengan belum adanya transportasi yang mendukung potensi desa wisata yang dimiliki oleh Desa Tambaksari. Transportasi menuju Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” diketahui belum memadai, satu satunya transportasi umum yang dapat dijangkau masyarakat ialah dengan memakai angkutan bus antarkota. Jarak antara Balai Desa Tambaksari dengan terminal bus terdekat, yakni Terminal Bus Sidareja sepanjang 41 kilometer, atau dapat ditempuh pada periode kurang lebih satu jam memakai kendaraan bermesin empat roda.

Indikasi masalah kedua ialah sarana prasarana umum yang ada di Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” diketahui juga belum cukup memadai. Sebagai desa wisata berkembang, kriteria pengembangan sarana prasarana merupakan kriteria penentu klasifikasi sebuah desa wisata. Kebutuhan sarana prasarana yang belum memadai dapat menjadi hambatan pengembangan desa wisata.

Indikasi masalah ketiga ialah promosi desa wisata. Sarana dalam mempermudah distribusi informasi dan promosi terdapat beberapa metode dalam promosi (dalam Buku Pedoman Desa Wisata,2021) yakni *Branding*, *Advertising* dan *Selling*. Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” diketahui masih belum maksimal dengan dalam memakai media online sebagai media *advertising*. Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” melalui akun Instagram /www.instagram.com/tambaksari\_ekowisata/ yang mengacu pengamatan penulis, aktivitas dari akun *Instagram* tersebut masih belum dilaksanakan secaramasif dibuktikan dengan jeda waktu postingan yang tidak mencapai 10 postingan dalam satu tahun.

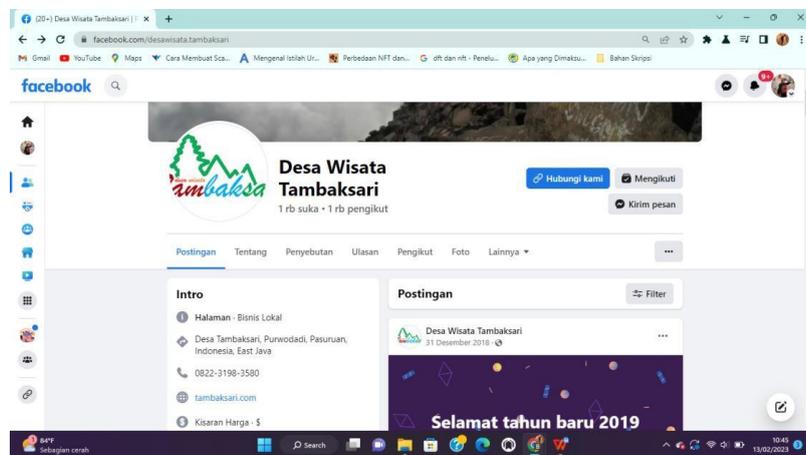
**Gambar 3. Beranda Akun Media Sosial Instagram Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”**



Sumber : Instagram

Selain akun Instagram, akun media sosial lainnya terdapat akun *Facebook* <https://www.facebook.com/desawisata.tambaksari> yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan akun *Instagram*, aktivitas terakhir yang diposting dalam akun tersebut merupakan postingan di tahun 2018 atau sekitar 5 tahun lalu.

**Gambar 4. Beranda Akun Media Sosial Facebook Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”**



Sumber : Facebook

Mengacu pengamatan penulis dalam indikasi masalah pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” terdapat beberapa identifikasi masalah, antara lain :

1. **Koordinasi antar stakeholder yang belum efektif.** Terdapat akses jalan yang dipakai untuk menuju lokasi desa wisata dalam kondisi yang kurang layak. Pengembangan akses dan transportasi desa merupakan tanggungjawab pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota. Pengembangan akses dan transportasi yang belum efektif menunjukkan kurangnya koordinasi antar stakeholder yang

terlibat dalam pengelolaan jalan dan infrastruktur. Stakeholders yang terlibat yakni POKDARWIS sebagai pelaksana desa wisata, Kepala Desa Tambaksari sebagai penanggungjawab, DISPORAPAR Kabupaten Cilacap sebagai Pembina, Forum Komunikasi Desa Wisata sebagai penasehat.

2. **Kontribusi stakeholder dalam pengembangan desa wisata belum optimal.** Kurangnya infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata di desa wisata berdampak pada kurangnya pemanfaatan terhadap potensi wisata dari segi sosial, keuangan, dan proyeksi pembangunan. Kegiatan pariwisata memerlukan infrastruktur yang memadai agar pengunjung atau wisatawan dapat menikmati pengalaman pariwisata dengan nyaman. Pembangunan infrastruktur pariwisata memerlukan investasi yang signifikan melalui kontribusi stakeholder. Mengacu hal tersebut, stakeholder yang berperan yakni POKDARWIS sebagai pelaksana desa wisata, Pemerintah Desa Tambaksari sebagai penanggungjawab, DISPORAPAR sebagai Pembina dan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagai penasehat.
3. **Peran stakeholder dalam usaha promosi destinasi wisata masih kurang.** Memanfaatkan promosi desa wisata merupakan strategi yang dapat dipakai untuk meningkatkan pembangunan desa wisata dengan mengundang minat wisatawan untuk mengunjungi desa tersebut. Mengacu pengamatan penulis, promosi yang dilaksanakan di Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” belum maksimal. Peran

stakeholders terkait dengan promosi yakni anggota POKDARWIS khususnya dalam bidang promosi, DISPORAPAR selaku Pembina, , Pemerintah Desa Tambaksari sebagai penanggungjawab dan Forum Komunikasi Desa Wisata Kbaupaten Cilacap.

Pengelola desa wisata telah melaksanakan upaya dalam melaksanakan pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”, akan tetapi ditemukan permasalahan yang menjadi hambatan menjalankan peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata. Mengacu identifikasi masalah diatas, peneliti meyakini terdapat peran stakeholder yang belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan identifikasi masalah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji mengenai Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahannya yakni:

1. Bagaimana peran stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kecamatan Wanareja?
2. Apa saja kendala peran antar stakeholder dalam melaksanakan pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kecamatan Wanareja?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat diraih dari penelitian ini yakni:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kecamatan Wanareja.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kecamatan Wanareja.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diraih dari penelitian ini yakni:

1. Bagi peneliti  
Menerapkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang berhubungan dengan penelitian
2. Bagi Pemerintah  
Memberikan pandangan dan wawasan serta dapat dijadikan bahan kajian dan evaluasi guna meningkatkan kualitas pada pengembangan desa wisata di Kabupaten Cilacap.
3. Bagi masyarakat  
Memberikan gambaran dan informasi mengenai perkembangan desa wisata yang dilaksanakan stakeholder di Kabupaten Cilacap.
4. Bagi peneliti lain  
Memberikan sebuah referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai peran stakeholder dalam pengembangan desa

wisata di Kabupaten Cilacap .

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik mengacu para ahli dalam Teori Administrasi Publik

- a. Menurut **Chandler dan Plano**, sebagaimana dikutip dalam **Keban** (2004), Administrasi Publik melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan staf publik untuk membuat, menerapkan, serta mengelola keputusan kebijakan publik. **Chandler & Plano** Administrasi publik diuraikan selaku perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan organisasi urusan publik serta pelaksanaan beragam tugas yang telah diputuskan. Disiplin ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dengan memperbaiki aspek-aspek tertentu, seperti SDM, organisasi, serta keuangan.
- b. Mengacu **Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock** dan **Louis W. Koenig** (dalam *Public Administration*, 1960), Administrasi publik ialah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk melaksanakan wewenang politiknya.
- c. Mengacu **Jhon M. Pfiffner** dan **Robert V. Presthus** (dalam Syafiie, 1999), memberikan definisi administrasi publik, ialah
  - 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh lembaga perwakilan politik;
  - 2) Mengkoordinasikan upaya individu serta kelompok untuk

menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk pekerjaan tiap hari pemerintah.

- 3) Proses yang terlibat dalam menerapkan beragam kebijakan pemerintah, memberikan arahan, keterampilan, serta teknik yang beragam untuk mengarahkan upaya berbagai individu.

d. Mengacu **Felix A. Nigro** dan **L. Loyd G. Nigro** (dalam Pasolong, 2010) memberikan definisi administrasi publik ialah

- 1) Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan,
- 2) Melibatkan tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan hubungan di antara keduanya,
- 3) Memiliki peran kunci dalam pembentukan kebijakan pemerintah, sehingga merupakan bagian dari proses politik,
- 4) Sangat terkait dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- 5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

e. Mengacu **Dwight Waldo** (dalam *The Study of Public Administration*, 1955), Administrasi publik didefinisikan sebagai pengelolaan dan organisasi dari individu-individu dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan pemerintah.

f. Mengacu **Nicholas Henry** (dalam Pasolong, 2010), memberikan definisi Administrasi Publik melibatkan kompleksitas menggabungkan teori dan praktik untuk meningkatkan pemahaman tentang peran

pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat yang dikelolanya, serta untuk mendorong pembentukan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Selain itu, Administrasi Publik berusaha menerapkan praktik manajemen yang memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

- g. Menurut **David H. Rosenbloom** (sebagaimana dirujuk dalam Teori Administrasi Publik, 2007), administrasi publik mencakup penerapan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam peran legislatif dan eksekutif, dengan penekanan pada peraturan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. masyarakat, baik seluruhnya maupun sebagian.

Mengacu berbagai definisi administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik melibatkan upaya kolaboratif sekelompok individu atau lembaga untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif guna memenuhi kebutuhan publik.

Dalam perkembangannya, Ilmu Administrasi Publik sering kali mengalami pergeseran paradigma ditandai dengan pergeseran lokus dan fokus ilmu administrasi publik yang menunjukkan disiplin ilmu tersebut mengalami perkembangan. Perkembangan paradigma administrasi publik mengacu Nicholas Henry dalam (Ikeanyibe et al., 2017: 3-6) terdiri atas:

### **1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)**

Paradigma dikotomi politik dan administrasi mengacu pada pemisahan fungsi politik dan administrasi pemerintahan merupakan

langkah untuk meningkatkan kinerja dan hasil kerja yang lebih baik. Goodnow dalam (Keban, 2014: 32) mengungkapkan Politik memiliki tujuan dalam merumuskan kebijakan atau mewakili aspirasi masyarakat, sementara administrasi difokuskan pada implementasi atau pelaksanaan kebijakan dan kehendak yang telah ditetapkan. Konsekuensi dari paradigma tersebut ialah bahwa administrasi harus dianggap netral secara nilai-nilai, dan diorientasikan pada pencapaian efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintah. Woodrow Wilson adalah pelopor paradigma ini, dengan menguraikan empat persyaratan penting untuk administrasi publik yang efektif, yaitu, (Woodrow Wilson mengidentifikasi empat persyaratan utama untuk administrasi publik yang efektif: (1) memisahkan politik dari administrasi, (2) melaksanakan analisis komparatif terhadap organisasi politik dan swasta, (3) meningkatkan efisiensi melalui praktik dan sikap bisnis dalam operasional sehari-hari, dan (4) meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pengelolaan dan pelatihan pegawai negeri sipil, serta mendorong evaluasi berbasis prestasi. Untuk memperjelas pemisahan antara gagasan politik dan administrasi, dapat dihubungkan dengan pemisahan antara nilai dan fakta yang relevan. Dengan demikian, bidang eksekutif dalam administrasi publik ditangani dengan pendekatan yang berbasis pada fakta dan ilmu pengetahuan, sementara pembuatan kebijakan publik dan topik terkaitnya diserahkan kepada para ahli politik. Dalam paradigma ke-1 hanya menekankan pada aspek

lokusnya saja yakni *government bureaucracy*, akan tetapi fokus pada paradigma ini tidak dijelaskan secara rinci.

## **2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)**

Paradigma prinsip-prinsip administrasi ialah perkembangan yang menekankan manajemen untuk meningkatkan administrasi publik. Fokus utamanya ialah pada penguasaan terhadap prinsip-prinsip administrasi. Meskipun prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di berbagai konteks, intinya tetaplah sama karena prinsip tetap menjadi prinsip dan administrasi tetaplah administrasi (Muhammad, 2019). Dalam pandangan ini, diyakini bahwa ada prinsip-prinsip administrasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Gulick dan Urwick memperkenalkan tujuh prinsip administrasi yang disebut sebagai POSDCROB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting*).

## **3. Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)**

Dalam pandangan administrasi publik sebagai komponen dari ilmu politik, ada konflik dengan disiplin administrasi publik itu sendiri. Pada saat yang sama, para ahli manajemen juga berusaha untuk menegaskan klaim mereka terhadap disiplin administrasi publik. Pada periode ini (Basheka, 2012) menggambarkan sebagai era kekosongan dikotomi dan menusuk prinsip - prinsip. Pemisahan administrasi dan politik tidak mungkin terjadi pada pemerintahan. Teori administrasi publik sama dengan teori politik. Sementara Herbert A. Simons melalui

karyanya *Administrative Behavior: A Study of Decision-making Processes in Administrative Organization* yang berisi kritik terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku secara universal. Hasilnya ialah pemulihan kembali peran utama birokrasi pemerintah, namun dalam paradigma ini, prinsip-prinsip dasar administrasi publik kehilangan prioritasnya. Administrasi publik pada perkembangannya hanya didefinisikan sebagai suatu penekanan atau *area of interest* atau sebagai persamaan dari ilmu politik. Pendekatan ini terus mendorong penggunaan birokrasi, yang menyebabkan kelebihan birokrasi dan penyebaran administrasi publik hampir di setiap tahap pemerintahan, dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya.

#### **4. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)**

Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya populer dikaji secara lebih mendalam dan ilmiah. Fokus utamanya meliputi perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penggunaan teknologi modern seperti pendekatan kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasional. Paradigma keempat ini dianggap dapat diterapkan tidak hanya pada lingkungan bisnis namun juga pada administrasi publik sehingga mengaburkan batas antara kedua bidang tersebut (Keban, 2014).

#### **5. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970- sekarang)**

Pada tahap ini, terdapat usaha untuk memperkuat administrasi publik sebagai bidang studi yang mandiri. Administrasi publik mulai

memusatkan perhatian pada struktur hierarki, sementara birokrasi dialihkan ke pasar dan organisasi sektor swasta. Dapat dikatakan bahwa terjadi perpindahan dari model administrasi publik konvensional ke model NPM (*New Public Management*). NPM muncul untuk menghadapi masalah yang sama yakni inefisiensi dalam sistem administrasi. Administrasi publik tradisional memandang pemerintah sebagai entitas yang memiliki otoritas dan otonomi melalui struktur birokrasi yang hierarkis serta proses pemberian layanan publik. Paradigma ini mempunyai orientasi dan fokus yang jelas. Ini berpusat pada teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik dalam bidang administrasi publik, menekankan isu-isu dan kepentingan masyarakat.

#### **6. Paradigma 6: *Governance* (1990-sekarang)**

Berkembangnya jaman dapat melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan baru sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada masa lalu atau memperbaiki ilmu pengetahuan yang sudah ada. Paradigma administrasi publik terus mengalami perubahan hingga melahirkan paradigma baru yakni *Governance* atau *New Public Service*. Dalam konsep *governance*, terdapat penekanan yang lebih besar pada partisipasi dan kerjasama dengan berbagai jaringan aktor. Esensinya, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai mitra seperti masyarakat, LSM, sektor publik, dan sektor swasta untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Pemerintah mengatur melalui kombinasi hierarki birokrasi dan jaringan aktor untuk mencapai efisiensi serta nilai-nilai

penting lainnya. Oleh karena itu, istilah *governance* dipakai untuk menggambarkan proses fundamental pada pemerintahan modern yang berbeda dengan jalannya pemerintahan tradisional.

Penelitian Peran Stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” selaras pada paradigma keenam administrasi publik yakni administrasi publik sebagai *governance* yang berorientasi pada partisipasi dan kerjasama jaringan aktor dalam melaksanakan pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”.

### **1.5.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik ialah konsep dalam bidang administrasi publik yang mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. "Publik" dalam konteks ini merujuk pada sekelompok orang yang memiliki minat yang serupa, meskipun perlu dibedakan sedikit dari konsep "masyarakat" yang mencakup norma-norma yang mengikat anggotanya. Mengacu Thomas Dye (1981) kebijakan publik ialah apapun yang dilaksanakan pemerintah maupun yang tidak dilaksanakan (*status quo*) (Sagita et al., 2013).

James Anderson (dalam Winarno, 2007) mengemukakan mengenai Kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu panduan tindakan yang dirancang oleh satu orang atau sekelompok orang untuk mengatasi suatu masalah atau isu tertentu. Carl Friederick (dalam Agustino, 2006) mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu posisi yang, jika diungkapkan sekali, akan berpengaruh pada

keberhasilan keputusan yang akan diambil pada masa mendatang.. Paradigma ini mempunyai orientasi dan fokus yang jelas. Ini berpusat pada teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik dalam bidang administrasi publik, menekankan isu-isu dan kepentingan masyarakat.

Easton (Taufiqurokhman, 2014) memberikan definisi Kebijakan publik dijelaskan sebagai pengaturan nilai-nilai secara resmi bagi seluruh masyarakat atau sebagai penentuan nilai-nilai yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan (Taufiqurokhman, 2014) mengartikan makna kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value and practice* , atau strategi untuk mencapai tujuan dan nilai tersebut melalui praktik tertentu. Pressman dan Windavsky (dalam Winarno, 2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian asumsi yang mencakup kondisi awal dan hasil yang dapat diperkirakan.

Mengacu definisi – definisi terkait, penelitian dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan Publik ialah suatu tatanan yang mengandung nilai – nilai publik dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah guna mengatur serta menyelesaikan permasalahan publik.

#### **1.5.2.1 Proses Kebijakan Publik**

Siklus kebijakan publik mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Rangkaian kegiatan politis ini terlihat dalam serangkaian langkah yang meliputi penentuan agenda, pembuatan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan

**Gambar 4. Proses Kebijakan Publik**



Sumber : William N Dunn dalam (Taufiqurokhman, 2014)

Proses pembentukan agenda terjadi ketika pembuat kebijakan bersaing untuk memasukkan masalah-masalah publik ke dalam agenda kebijakan. Dalam proses ini, beberapa masalah menjadi fokus pembahasan sedangkan yang lain ditunda. Setelah agenda terbentuk, langkah selanjutnya ialah formulasi kebijakan, di mana pembuat kebijakan memberikan definisi masalah-masalah yang terdapat dalam agenda untuk dicari solusi terbaiknya. Pilihan-pilihan tersebut diraih dari berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Dari berbagai pilihan yang diajukan, satu kebijakan akan dipilih untuk diadopsi dengan dukungan konsensus. Setelah kebijakan diambil, langkah selanjutnya ialah melaksanakan kebijakan tersebut. Pada tahap implementasi dalam

(Taufiqurokhman, 2014) membutuhkan alokasi sumber daya dan membentuk struktur organisasi untuk melaksanakan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Implementasi Kebijakan (Hidayat, 2019) merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar dapat berwujud dalam bentuk undang-undang, perintah eksekutif, atau putusan pengadilan yang seringkali krusial. Keputusan-keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, dengan jelas merumuskan tujuan atau target yang ingin dicapai, serta menyajikan berbagai metode untuk mengatur proses implementasinya.. Tahap terakhir dalam proses kebijakan ialah evaluasi, yang melibatkan penilaian terhadap pelaksanaan, kinerja, dan efek kebijakan. Hasil evaluasi tersebut krusial untuk merancang kebijakan baru di masa mendatang, dengan harapan agar kebijakan yang akan datang dapat menjadi lebih unggul dan berhasil dibandingkan sebelumnya.

Proses kebijakan yang terjadi dalam penelitian ini berada pada proses implementasi kebijakan karena pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” dijalankan berdasar kebijakan pengembangan pariwisata dengan kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di provinsi Jawa Tengah mengenai desa wisata yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan sebagai langkah pemberdayaan desa.

### 1.5.3 Peran Stakeholder

Peran ialah serangkaian harapan yang kompleks terhadap perilaku dan tindakan individu dalam situasi tertentu, yang diputuskan oleh status dan fungsi sosial mereka. Mengacu pandangan Soerjono Soekanto (dalam Sosiologi Suatu Pengantar, 2002), Peran ialah aspek yang berubah-ubah dari posisi seseorang; ketika seseorang memenuhi hak dan tanggung jawab selaras pada posisinya, ia memainkan suatu peran. Peran merupakan aksi atau perilaku yang dilaksanakan individu yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Syarat-syarat peran meliputi tiga hal, yakni :

- a. Peran mencakup aturan-aturan yang terkait dengan posisi atau peran seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran merupakan seperangkat pedoman yang mengarahkan individu dalam kehidupan sosial mereka.
- b. Peran merupakan konsep perilaku yang menentukan tindakan yang dapat dilaksanakan individu dalam konteks sosial masyarakat. Peran juga merupakan perilaku individu yang memiliki peranan penting dalam struktur sosial masyarakat.
- c. Peran merupakan sebuah urutan tertata yang timbul karena seseorang menduduki suatu jabatan.

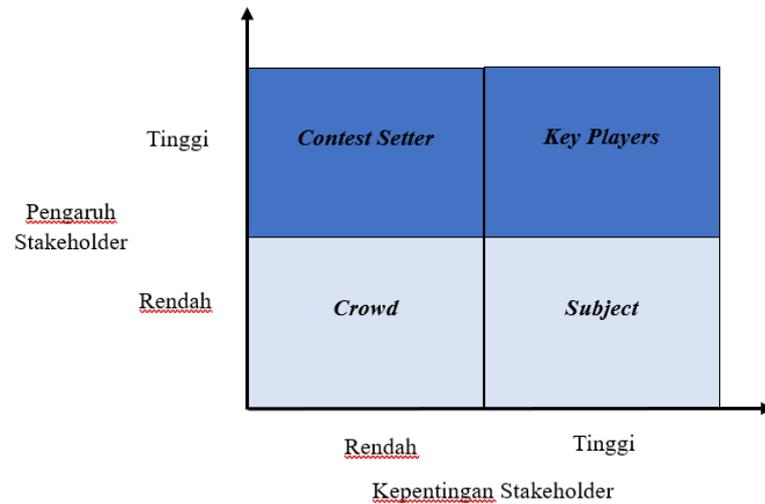
Sebagai makhluk sosial, manusia biasanya lebih suka hidup berkelompok. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan, terlibat, atau terkena dampak (baik positif maupun negatif) oleh kegiatan atau inisiatif pembangunan (Kristin dan

Salam, 2016). Dari pengertian tersebut, stakeholder bisa dianggap sebagai segala kalangan masyarakat yang memiliki kepentingan dan terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan atau kebijakan, serta keterlibatan mereka memiliki dampak pada kebijakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengacu tingkat kepentingan dan pengaruh seorang tokoh bernama Bryson (Hardiansyah, 2012) mengklasifikasikan beberapa stakeholder sebagai berikut,

1. **Subyek (*Subject*)**, stakeholder yang mempunyai pengaruh rendah namun berkepentingan tinggi.
2. **Pemain kunci (*key player*)**, ialah stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi serta memiliki kepentingan yang tinggi pula.
3. **Pengikut Lain (*Crowd*)**, ialah *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang rendah serta kepentingan yang rendah juga.
4. **Pendukung (*contest setter*)**, ialah stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi akan tetapi memiliki kepentingan yang rendah.

**Gambar 4. Kategorisasi Stakeholder**



Sumber : Bryson (Hardiansyah, 2012)

Analisis dimulai dengan membuat matriks dua kali dua yang menggambarkan stakeholder mengacu pengaruh mereka terhadap masalah tertentu dan kepentingan mereka dalam memengaruhi masalah tersebut dalam Siregar (2011). Pengaruh ialah dorongan atau sugesti yang dapat membentuk atau menciptakan efek tertentu mengacu Hugiono dan Poerwantoro dalam (Patrisia & Himpong, 2019). Pengaruh (*influence*) merujuk pada kemampuan atau kekuatan (*power*) stakeholder untuk mengontrol hasil dari suatu keputusan. Mengacu Weber, Kepentingan menjadi pendorong bagi perilaku manusia, di mana perspektif individu terhadap lingkungan mereka, termasuk kepentingan yang mereka miliki, akan mengarahkan langkah-langkah yang mereka ambil dalam (Sumarti, 2007). Kepentingan

(*importance*) merujuk pada kebutuhan stakeholder dalam mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi stakeholder mengacu pengaruh dan kepentingannya, peneliti mengukur pengaruh dan kepentingan dengan memakai model dalam Siregar (2011) yakni:

**A.**

**B. Pengaruh Stakeholder**

1. Usulan Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata.

Usulan dari stakeholder yang diterima oleh implementor dalam proses pelaksanaan desa wisata oleh stakeholder.

2. Kontribusi yang diberikan Stakeholder.

Kontribusi yang diberikan stakeholder berupa fasilitas dalam pengembangan desa wisata meliputi transportasi, trail/jalur wisata, perlengkapan/sarpras wisata.

3. Keterlibatan SDM Stakeholder.

Keterlibatan SDM stakeholder memiliki pengaruh dalam pengembangan desa wisata. Pengaruh ditunjukkan dengan kapasitas SDM stakeholder terlibat.

4. Dukungan Anggaran yang diberikan.

Dukungan yang diberikan stakeholder berupa anggaran dalam pengembangan desa wisata.

5. Keterlibatan Stakeholder dalam Meningkatkan Daya Tarik Desa Wisata

Kemampuan stakeholder dalam upaya meningkatkan daya

Tarik desa wisata dengan melakukan promosi, kemampuan menjalin hubungan sesama stakeholder dan kemampuan menarik wisatawan.

### **C. Kepentingan Stakeholder :**

#### **1. Keterlibatan Stakeholder dalam Management Desa Wisata**

Stakeholders memiliki keterlibatan pada proses management desa wisata yang meliputi : proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”.

#### **2. Kebermanfaatan Desa Wisata bagi Stakeholder**

Keberadaan desa wisata memberikan manfaat bagi stakeholder meliputi manfaat desa wisata sebagai sumber penerimaan dana, menciptakan lapangan kerja, berinteraksi dengan masyarakat luar dalam pengembangan desa wisata

#### **3. Penggunaan Wewenang Stakeholder. Penggunaan wewenang stakeholder dalam pengembangan desa wisata meliputi**

wewenang dalam pembangunan sarana prasarana desa wisata, pemberdayaan masyarakat setempat dalam bidang desa wisata.

#### **4. Komitmen Stakeholder dalam Memprioritas Desa Wisata.**

Pengembangan desa wisata dikatakan sebagai program yang diprioritas stakeholder.

#### **5. Hubungan Ketergantungan Stakeholder dalam Desa Wisata.**

Ketergantungan stakeholder ialah hubungan yang saling

menguntungkan antara stakeholder yang terlibat dengan pengembangan desa wisata.

Peran Stakeholders mengacu Nugroho (dalam *Public Policy*, 2014) Stakeholder dalam agenda pembangunan dikategorikan mengacu fungsi atau peran yang mereka emban, antara lain :

1. **Policy creator** yakni Stakeholder yang memiliki peran sebagai pembuat keputusan dan pengatur kebijakan..
2. **Koordinator** yakni Stakeholder yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pihak-pihak lain yang terlibat.
3. **Fasilitator** yakni Stakeholder yang bertindak sebagai fasilitator, memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran..
4. **Implementor** yakni Stakeholder yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan, di antaranya melibatkan kelompok sasaran..
5. **Akselerator** yakni Stakeholder yang berfungsi untuk mempercepat dan memberikan kontribusi agar sebuah program mencapai tujuannya sesuai rencana atau bahkan lebih cepat.

Dari gambaran definisi peran stakeholder terkait, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran stakeholder ialah aktivitas atau tingkah laku yang dilaksanakan pihak yang memiliki posisi tertentu dalam konteks sosial sebagai pelaksanaan hak dan tanggung jawab mereka. Identifikasi penelitian Peran Stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” selaras pada teori identifikasi stakeholder mengacu Bryson dalam mengidentifikasi peran stakeholder pengembangan

desaa wisata. Bryson mengidentifikasi klasifikasi stakeholder mengacu tingkat kepentingan dan pengaruh (Hardiansyah, 2012b). Analisis Peran Stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” sesuai dengan teori peran stakeholder mengacu Riant Nugroho (dalam *Public Policy*, 2014). Peran stakeholders mengacu Nugroho dianalisis melalui peranan didalam program pembangunan atau *public policy*.

#### **1.5.4 Kendala Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata**

##### **“Ekowisata Tambaksari”**

Kendala merupakan hambatan atau halangan yang terdiri dari situasi atau kondisi yang membatasi, menghalangi, atau menghambat pencapaian tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Kendala memiliki makna yang sangat signifikan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan apa pun. Sebuah tugas atau pekerjaan tidak dapat berhasil dilaksanakan jika ada hambatan yang menghalangi jalannya pekerjaan tersebut. Kendala dalam peran stakeholders merujuk pada hambatan atau rintangan yang dapat mempengaruhi kemampuan pihak - pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) dalam berperan dalam suatu organisasi, proyek, atau inisiatif tertentu. Kendala tersebut dapat berupa faktor internal maupun eksternal yang menghalangi stakeholder dalam memainkan peran mereka yang diharapkan.

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran sentral dalam organisasi karena semua potensi yang dimiliki manusia dapat dioptimalkan untuk mencapai kesuksesan, baik pada tingkat individu maupun organisasional. SDM yang terkendala tidak dapat memberikan segala potensi secara maksimal dalam

pengembangan desa wisata. Manajemen sumber daya manusia (*Human Resource Management*) ialah rangkaian proses yang melibatkan perekrutan, pelatihan, evaluasi, dan kompensasi karyawan serta pengelolaan hubungan kerja mereka. Kesejahteraan dan keamanan mereka, bersama dengan aspek-aspek yang terkait dengan keadilan mengacu Gary Dessler (Widyaningrum & Siswati, 2017). Mengacu Gary Dessler menyebutkan tantangan atau kendala yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia (Widyaningrum & Siswati, 2017) meliputi :

1. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi mendorong manajemen sumber daya manusia untuk menyatukan aplikasi teknologi dalam penyelenggaraan mereka, memungkinkan pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

2. Globalisasi dan Kompetisi

Globalisasi ialah konsep yang merujuk pada ekspansi perusahaan dalam hal penjualan, kepemilikan, atau produksi mereka ke pasar-pasar baru di luar negeri. Fenomena globalisasi ini menciptakan persaingan yang lebih sengit dalam hal sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

3. Regulasi

Tantangan lainnya ialah regulasi. Beberapa negara mulai mengurangi regulasi, seperti yang terlihat di Amerika Serikat dan Eropa, di mana aturan yang menghambat bank komersial untuk terlibat dalam perdagangan saham telah dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi memiliki dampak

pada sumber daya manusia yang terpengaruh oleh regulasi tersebut.

#### 4. Sifat pekerjaan

Organisasi harus memiliki keberanian untuk menginvestasikan pada modal manusia, yakni kondisi di mana SDM memiliki tingkat pengetahuan, pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang tinggi, sehingga dapat merespons tantangan dari perkembangan teknologi yang cepat.

Mengacu definisi – definisi diatas, peneliti menyimpulkan kendala peran stakeholders merupakan hambatan atau rintangan yang dapat mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) dalam berperan dalam suatu organisasi, proyek, atau inisiatif tertentu. Penelitian Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” selaras pada konsep teori kendala mengacu Gary Dessler (Widyaningrum & Siswati, 2017), hal ini disebabkan kendala yang dialami stakeholder mempunyai kaitan pada SDM stakeholder yang terlibat dalam pengembangan desa wisata.

#### **1.5.5 Desa Wisata**

Desa wisata merupakan hasil dari penggabungan atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam kerangka kehidupan masyarakat yang terjalin dengan cara hidup dan tradisi yang ada di sana. Sedangkan mengacu Joshi (dalam Panduan Desa Wisata, 2012), Pariwisata pedesaan, atau yang dikenal sebagai desa wisata, mencakup pengalaman yang melibatkan segala aspek kehidupan pedesaan, termasuk keindahan alam, tradisi lokal, serta elemen-elemen khas yang secara keseluruhan menarik minat para wisatawan.

Mengacu Subagyo (dalam Modern sebagai Manusia, 1991), dari sudut pandang kehidupan masyarakatnya, pariwisata pedesaan atau desa wisata menawarkan pengalaman wisata yang didasarkan pada kehidupan desa yang unik, keindahan alam, dan kekayaan budaya yang dimilikinya. Hal ini membuatnya menjadi sebuah potensi komoditas wisata, terutama bagi wisatawan asing.

Kehidupan desa sebagai tujuan wisata mencakup peran ganda, yakni sebagai objek dan subjek pariwisata. Desa tidak hanya berperan sebagai tempat tujuan wisata, melainkan juga sebagai penyelenggara kegiatan pariwisata yang memberikan manfaat langsung bagi penduduk setempat. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan pariwisata desa ini.

Kesuksesan wisata desa atau desa wisata sangat tergantung pada tingkat aktivitas di lokasi, manajemen yang efektif, dan dukungan dari masyarakat lokal. Program ini harus selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, bukan diputuskan secara sepihak. Dukungan dari komunitas setempat tidak hanya tergantung pada individu atau kelompok spesifik. Langkah-langkah untuk memobilisasi modal usaha, meningkatkan keterampilan pemasaran, dan membangun citra yang kuat perlu diambil, karena para wisatawan mencari pengalaman yang unik dan produk yang menarik.

Desa wisata ialah area yang memiliki daya tarik wisata yang khas dan potensial, yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat pedesaan beserta semua potensi yang dimilikinya (dalam Pedoman Desa Wisata, 2021). Desa wisata dapat dilihat

Mengacu kriteria berikut ini:

- a. Punya potensi daya tarik pariwisata (baik itu alam, budaya, atau hasil karya kreatif);
- b. Memiliki komunitas masyarakat yang aktif;
- c. Terdapat potensi sumber daya manusia lokal yang dapat ikut serta dalam pengembangan desa wisata;
- d. Terdapat lembaga atau struktur pengelolaan yang sudah ada;
- e. Ada kesempatan dan dukungan untuk fasilitas dasar dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata;
- f. Terdapat potensi dan peluang untuk melaksanakan pengembangan pasar wisatawan.

Desa Wisata bisa terbentuk dari kumpulan desa yang berdekatan, membentuk konsep pariwisata pedesaan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wisata lebih fokus pada pengalaman dan suasana yang dirasakan oleh pengunjung selama berkunjung, daripada terpaku pada batas-batas administratif tertentu. Dalam melaksanakan pengembangan Desa Wisata, prinsip pengembangan produk pariwisata desa menjadi fokus:

1. Keaslian: pengalaman yang ditawarkan ialah aktivitas asli yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di desa tersebut;
2. Keterlibatan Masyarakat Lokal: aktivitas yang menjadi bagian dari kehidupan tiap hari dan tradisi yang dijalankan oleh penduduk setempat;
3. Partisipasi Masyarakat: masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan yang ada di desa wisata;

4. Sikap dan Nilai: tetap mempertahankan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dan selaras pada norma-norma yang berlaku; dan
5. Konservasi dan Kehandalan: tidak menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun sosial terhadap masyarakat dan selaras pada kapasitas desa dalam menerima wisatawan.

Desa wisata memiliki potensi untuk menanggulangi migrasi penduduk dari desa ke kota dengan menawarkan berbagai peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di lingkungan desa. Selain itu, desa wisata juga berperan dalam upaya pelestarian dan pemberdayaan potensi budaya lokal serta nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Terdapat empat jenis desa wisata yang dapat dijadikan pedoman, antara lain :

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam yakni desa wisata yang mengandalkan keindahan alam sebagai daya tarik utamanya, seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau, serta formasi alam lainnya yang unik..
2. Desa wisata yang terfokus pada kekhasan sumber daya budaya lokal, mengedepankan adat istiadat, tradisi, serta gaya hidup tiap hari masyarakat sebagai daya tarik utamanya. Ini mencakup aktivitas ekonomi, kegiatan keagamaan, dan variasi kegiatan lainnya.
3. Desa wisata kreatif merupakan konsep desa wisata yang memprioritaskan keunikan ekonomi kreatif yang berasal dari industri rumah tangga masyarakat lokal, termasuk kerajinan dan seni khas, sebagai fokus utamanya.

4. Desa wisata berbasis kombinasi ialah jenis desa wisata yang mengintegrasikan satu atau lebih elemen daya tarik wisata yang dimiliki, seperti keindahan alam, keberagaman budaya, dan inovasi kreatif, menjadi satu kesatuan yang utuh.

Mengacu definisi yang disebutkan terkait, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Wisata ialah hasil gabungan antara berbagai atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang tersedia di dalam lingkungan masyarakat, yang membentuk bagian integral dari industri pariwisata..

### **1.5.6 Pengelolaan Desa Wisata**

#### **a. Komponen Produk Desa wisata**

Sebagai sebuah sistem ekosistem yang utuh, Desa Wisata membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana desa memanfaatkan keunikan dan keunggulan, serta mengidentifikasi kelemahan agar dapat menjadi daya tarik yang kuat sebagai destinasi desa wisata. Pemahaman sebagai konsep dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata memiliki beberapa komponen antara lain:

Terdapat konsep dasar dalam melihat pariwisata. Konsep pariwisata 3A : Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas (Asri, n.d. dalam Pedoman Desa Wisata, 2021) antara lain :

##### **1. Atraksi**

Atraksi, sering disebut sebagai Daya Tarik, mengacu pada elemen atau sumber daya yang memiliki kemampuan untuk menarik minat wisatawan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Daya tarik ini memberikan motivasi pertama bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi. Daya tarik dibagi menjadi 3 kategori yakni:

- a. Alam (*Nature*). Keindahan alam dan lanskap, keberagaman fauna dan flora, pesisir dan lautan, serta keindahan bawah lautnya, disertai dengan berbagai aktivitas seperti trekking, bersepeda gunung, menunggang kuda, hiking, snorkeling, menyelam, dan safari, serta kegiatan seperti pendakian, berkemah, diving, snorkeling, kunjungan ke geopark, taman nasional, wisata pantai, dan sebagainya.
- b. Budaya (*Culture*). Warisan sejarah, seni, kerajinan, acara budaya, serta kehidupan masyarakat lokal, kuliner, dan berbagai kegiatan seperti mengikuti festival, mengikuti upacara adat, belajar tarian tradisional, dan mempelajari sejarah dan warisan budaya.
- c. Kreatif (*Creative*). Gabungan berbagai kategori ini menunjukkan bahwa Desa Wisata dapat menjadi Desa Wisata Kreatif, seperti mengintegrasikan tradisi membatik di desa dengan keindahan alamnya, yang menghasilkan atraksi pembuatan pewarna alami serta penerapan teknik membatik tradisional, menciptakan daya tarik yang menarik bagi pengunjung dan sebagainya. Aksesibilitas

Desa wisata harus memastikan ketersediaan aksesibilitas yang optimal dengan menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan sistem transportasi yang memudahkan perjalanan wisatawan dari dan ke

destinasi desa tersebut. Hal ini termasuk jalur transportasi laut, darat, dan udara. Selain itu, wisatawan juga harus dapat dengan lancar menjelajahi area sekitar destinasi pariwisata.

## 2. Amenitas

Fasilitas, infrastruktur, perlengkapan, dan amenitas yang mendukung aktivitas dan pelayanan kepada wisatawan, termasuk infrastruktur dasar seperti layanan umum, transportasi publik, dan jaringan jalan. Pelayanan langsung bagi wisatawan meliputi informasi, kegiatan rekreasi, pemandu wisata, operator tur, layanan catering, fasilitas belanja, serta Sumber Daya Manusia (SDM), masyarakat, dan industri terkait.

Mengacu Cooper dkk (1995), Destinasi pariwisata harus memenuhi empat aspek kunci (4A), yakni *Attractiveness* (Daya Tarik), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenities* (Fasilitas Pendukung), dan *Ancillary* (Organisasi/Pendukung Lainnya).

1. *Attraction* (Daya tarik) yakni Produk utama dari suatu destinasi mempunyai kaitan pada pengalaman yang dapat dinikmati oleh wisatawan di desa wisata tersebut. Atraksi tersebut bisa berupa panorama alam yang indah, kekayaan budaya lokal, fasilitas rekreasi, dan berbagai hal lainnya. Atraksi, juga dikenal sebagai Daya Tarik, merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan untuk menarik minat para wisatawan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Daya tarik ini memberikan motivasi

pertama bagi para wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi.

Daya tarik tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- a. Alam (*Nature*). Daya tarik dari keindahan alam termasuk pemandangan alam yang menakjubkan, ragam flora dan fauna, serta pantai yang menawan dengan kehidupan lautnya yang memukau. Aktivitas wisata alam seperti hiking, bersepeda gunung, horseback riding, rock climbing, snorkeling, dan diving menawarkan pengalaman yang menarik. Selain itu, terdapat juga kesempatan untuk melaksanakan perjalanan geopark, mengunjungi taman nasional, menikmati wisata pesisir pantai, dan berbagai kegiatan lainnya.
- b. Budaya (*Culture*). Sejarah, seni dan kerajinan, acara dan pertunjukkan budaya, interaksi dengan masyarakat lokal, kuliner lokal, serta berbagai aktivitas seperti mengikuti festival, mempelajari warisan budaya, mengikuti upacara adat, dan belajar tarian tradisional.
- c. Kreatif. Gabungan beragam elemen ini menunjukkan bahwa Desa Wisata memiliki potensi untuk menjadi Desa Wisata Kreatif. Sebagai contoh, menggabungkan warisan tradisional seperti pembuatan batik dengan keindahan alamnya dapat menciptakan daya tarik baru, seperti atraksi proses pembuatan pewarna alami yang diintegrasikan dengan teknik pembuatan batik, yang menarik minat pengunjung dan sebagainya.

2. *Accessibility* (Keterjangkauan) Ini mencakup sarana dan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai desa wisata, seperti jalan raya yang mudah diakses, ketersediaan transportasi, dan tanda-tanda petunjuk jalan.
3. *Amenity* (fasilitas pendukung) yakni Ini mencakup semua fasilitas pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan selama kunjungan mereka ke destinasi. Termasuk dalam hal ini ialah tersedianya akomodasi untuk menginap, serta pilihan tempat makan dan minum, seperti restoran atau warung di area desa wisata.
4. *Ancillary* (organisasi/kelembagaan pendukung) yakni terhubung dengan ketersediaan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan desa wisata tersebut.

**b. Kriteria Desa Wisata**

Sebuah desa dapat dianggap sebagai desa wisata apabila memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Atraksi, yang mencakup segala aspek keindahan alam, budaya, dan warisan manusia.
- 2) Jarak tempuh, yang mencakup jarak dari lokasi wisata terutama ke tempat tinggal para pengunjung serta jarak dari ibukota provinsi dan kabupaten.
- 3) Skala Desa, yang melibatkan jumlah penduduk, karakteristik, dan ukuran wilayahnya. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan

desa untuk menampung aktivitas pariwisata.

- 4) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, yang merupakan faktor penting mengingat adanya norma dan nilai-nilai khusus dalam komunitas desa. Faktor yang perlu dipertimbangkan mencakup agama mayoritas dan sistem kemasyarakatan.
- 5) Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, pasokan listrik, sistem telekomunikasi, dan elemen-elemen lainnya.

Mengacu definisi terkait, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Wisata sebagai memerlukan pemahaman yang terintegrasi. Pemahaman sebagai konsep dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata memiliki beberapa komponen seperti konsep 3A, 4A, dan 5A.

## **1.5.7 Kerangka Pemikiran Terdahulu**

### **1.5.9.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yakni penelitian yang telah dilaksanakan seseorang dan kemudian menjadi bahan referensi dalam pembuatan penelitian ini. Mengacu Randi (2018) dalam (Tamba, 2022), Penelitian terdahulu merupakan catatan masa lalu mengenai penelitian yang telah dilaksanakan, yang dipakai oleh peneliti untuk membandingkan dan mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian terdahulu berperan sebagai referensi yang menginspirasi dan membantu pelaksanaan penelitian yang baru. Penelitian terdahulu bertujuan agar penelitian

mencapai hasil maksimal, mencegah terjadinya plagiasi, mengetahui bangunan keilmuan, memperkuat dan mendukung penelitian, menggambarkan perbedaan penelitian serta guna mengetahui langkah yang sudah dilaksanakan peneliti sudah benar atau salah.

Bagian penelitian terdahulu, peneliti mencatat beragam temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Berbagai hasil penelitian terdahulu dibuat sebagai ringkasan dan dimasukkan ke dalam table penelitian terdahulu. Peneliti menganalisis mengenai topik analisis peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata, mengacu pemilihan topik tersebut ringkasan tabel penelitian terdahulu mengandung topik yang memiliki korelasi. Terdapat 15 sumber penelitian terdahulu yang sudah diringkas peneliti sebagai bahan ref rensi. Pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang dipakai sebagai bahan referensi dan acuan, yakni :

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Tsuraya Annisa Salsabila, R. Slamet Santoso (2018)	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana peran tiga aspek utama pariwisata untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka di Desa Wisata Carangsari..	Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Desa Wisata Carangsari memiliki tiga pilar pariwisata yang aktif. Pemerintah Desa Carangsari telah mengimplementasikan program-program yang diturunkan dari pemerintah daerah sebagai upaya dalam melaksanakan pengembangan sektor pariwisata. Pengusaha lokal juga turut berperan dengan menjalankan usaha-usaha yang diharapkan dapat mempromosikan daya tarik Desa Carangsari kepada para wisatawan. Masyarakat lokal diajak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari aktivitas pariwisata. Namun, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pilar-pilar pariwisata tersebut menghambat terbentuknya persepsi yang bersatu dalam upaya pengembangan desa wisata ini.

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
2.	Shafa Raya Cahyana, Saptono Nugroho (2019) (Cahyana & Nugroho, 2019)	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melaksanakan analisis terhadap peran stakeholder dalam program pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mungkin muncul dalam program tersebut.	Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan menerapkan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen daring	Masyarakat berperan sebagai pelaksana program (subjek program), sedangkan Bank Sampah Karya Melati dan KSM bertugas sebagai pengoordinasi, pelaksana, dan akselerator. Pemerintah Kota Semarang berperan sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator, sementara DLH Kota Semarang berfungsi sebagai pembuat kebijakan, pengoordinasi, dan fasilitator. Kecamatan Tugu bertanggung jawab sebagai pengoordinasi dan fasilitator, sedangkan kelurahan Mangkang Kulon bertugas sebagai pengoordinator dan fasilitator. Tidak efektifnya komunikasi, orientasi pada uang, kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya apresiasi, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur ialah faktor-faktor yang menghambat Program Pilah Sampah.
3.	Ervin Dwi Ariyanto, AUFARUL MAROM (2021)	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melaksanakan evaluasi efektivitas peran stakeholder serta interaksi antar stakeholder dalam pengembangan objek wisata Candi Gedongsongo.	Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dan memakai metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas partisipasi tujuh pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi wisata Candi Gedongsongo belum mencapai tingkat yang diharapkan.</li> <li>2. Meskipun hubungan antara pemangku kepentingan dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo sudah baik, koordinasi di antara mereka masih belum optimal.</li> </ol>

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
4.	Beny Setiawan, Herbasuki Nurcahyanto (2020)  (Setiawan & Nurcahyanto, 2018)	Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan melaksanakan evaluasi peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan untuk menurunkan angka kematian ibu di Kec. Pedurungan, Kota Semarang.	Metode penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif.	Stakeholders yang terlibat seperti stakeholders kunci berperan sebagai <i>policy creator</i> , fasilitator, akselerator, dan koordinator. Stakeholders primer berperan sebagai fasilitator, implementator. Stakeholders Sekunder yang masing-masing berperan sebagai fasilitator.
5.	Anggie Ayuni Nurfakhirah, R. Slamet Santoso dan Retna Hanani (2021)  (Diponegoro et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemangku kepentingan dengan melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera di Desa Mendongan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.	Metode penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.	Penelitian ini mengidentifikasi empat peran yang bisa diemban oleh pemangku kepentingan, yakni sebagai pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, dan pelaksana. Namun, analisis peran menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip kerjasama, partisipasi, independensi, kewajaran, dan kesetaraan masih belum optimal. Hasil pemetaan pemangku kepentingan dengan memakai Value Orientation Mapping mengungkapkan bahwa yang terlibat meliputi Pemerintah Desa Mendongan, Manajer/Kepala BUMDes Mitra Sejahtera Desa Mendongan, masyarakat Desa Mendongan bersama staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
6.	Desrika Talib (2020)	Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis peran <i>Stakeholder</i> dalam pengembangan destinasi wisata.	Metode penelitian ini memakai metode penelitian kajian pustaka.	Perkembangan pariwisata dan upaya menjaga keberlanjutannya membutuhkan kesadaran serta keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait. Stakeholder dalam hal ini mencakup pemerintah atau instansi lain yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan, masyarakat sebagai pengelola dan konsumen pariwisata yang sangat penting, serta organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan yang, meskipun memiliki peran pendukung, tetapi memiliki dampak yang signifikan dalam pembuatan kebijakan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.
7.	Riska Destiana, Kismartini dan Tri Yuningsih (2020)  (Destiana et al., 2020)	Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi stakeholders yang terlibat, menganalisis peran stakeholders, menganalisis hubungan antar stakeholders, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat.	Metode penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggabungkan wawancara secara daring, dokumentasi dan observasi.	Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat melibatkan berbagai pihak terkait, dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, pelaku bisnis, komunitas lokal, pemerintah, dan media massa. Sebanyak 38 stakeholders terlibat dalam proses ini, yang dibagi menjadi tiga kategori, yakni stakeholders primer, kunci, dan sekunder. Dalam pengembangan destinasi pariwisata halal, faktor penting yang mendukung ialah nilai dan komunikasi, sementara kepercayaan dan kebijakan menjadi faktor penghambatnya.

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
8.	Grace Ginting, Kismartini, Tri Yuniningsih dan Teuku Afrizal (2021) (Ginting et al., 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Siosar.	Metode penelitian yang dipakai yakni studi <i>literature review</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi stakeholder dalam pengembangan kawasan wisata Siosar belum mencapai tingkat yang signifikan. Keterbatasan peran stakeholder ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama dan komunikasi yang efektif antar mereka.
9.	Ni Putu Tiya Paristha, I Nyoman Sukma Arida dan Gde Indra Bhaskara (2022) (Purwaningsih & Mahagangga, 2018)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dan merumuskan model kerjasama dalam pengembangan Desa Wisata Kerta	Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan ialah pendekatan kualitatif dengan memakai teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara.	Hasil penelitian ini menunjukkan para pemangku kepentingan telah memainkan peran mereka, namun keterlibatan dari bisnis dan media masih relatif rendah.

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
10.	Fanny Soselissa, Billy Seipalla (2021)  (Soselissa & Ambon, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi bagaimana stakeholders terlibat dalam manajemen dan pengembangan destinasi wisata alam Siwang Paradise, serta mengidentifikasi kendala dalam upaya untuk mengelola dan melaksanakan pengembangan destinasi tersebut secara optimal.	Metode penelitian yang dipakai ialah deskriptif kualitatif. Penentuan responden dilaksanakan melalui teknik snowball sampling, dan analisis dilaksanakan secara induktif mengacu data dan hasil wawancara dengan responden serta aktor kunci.	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan objek Siwang Paradise terdiri dari aktor kunci (pemilik kawasan) dan aktor utama (masyarakat sekitar).
11.	Fitri Handayani dan Hardi Warsono (2017)  (Handayani & Warsono, 2017)	Mengidentifikasi dan melaksanakan evaluasi para pihak terkait, menjelaskan fungsi masing-masing dari mereka, dan menemukan faktor-faktor penghalang yang dihadapi oleh mereka.	Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik <i>purposive sampling</i> serta teknik <i>snowball sampling</i>	Stakeholders yang terlibat terbagi menjadi tiga kelompok, yakni stakeholders primer, kunci, dan sekunder. Pola kerjasama antara stakeholders dalam pengembangan objek wisata ialah sukarela dan bersifat saling memberi dan menerima, atau bisa disebut sebagai kemitraan mutualistik. Hal ini berarti kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari kerjasama yang dilaksanakan. Faktor-faktor yang menghambat upaya stakeholders dalam melaksanakan pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe meliputi masalah lahan, anggaran, sumber daya manusia, pola pikir, regulasi, promosi pariwisata, dan kerjasama antar stakeholders.

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
12.	I Wayan Mertha, Luh Yusni Wiarti, Anom Hery Suasapha (2018)  (Mertha et al., 2018)	Tujuan penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi peran para pemangku kepentingan sebagai aktor kunci dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata di Bali.	Metode penelitian ini menerapkan analisis kualitatif untuk menyusun, menyaring, dan menginterpretasikan data yang diraih melalui diskusi kelompok terfokus (FGD).	Partisipasi semua pihak terlibat, mulai dari pemerintah sebagai regulator, fasilitator, hingga pelaksana; masyarakat; pengusaha; akademisi; hingga media massa, diperlukan untuk mendorong pertumbuhan desa wisata di Bali. Tantangan utama yang dihadapi ialah koordinasi antar stakeholders yang belum optimal, serta kekurangan sosok agen perubahan yang mampu mengoordinasikan peran mereka.
13.	Ni'mah A. Hidayah, Simon S. Hutagalung, Dedy Hermawan (2019)  (Hidayah et al., 2019)	Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi stakeholder yang terlibat serta menganalisis peran mereka dalam pengembangan Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk.	Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan deskriptif.	Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air meliputi berbagai kelompok. Ada stakeholder primer seperti POKDARWIS dan Karang Taruna, stakeholder sekunder seperti Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, serta kelompok kontes setter yang terdiri dari Masyarakat Pajaresuk. Selain itu, ada juga stakeholder players seperti POKDARWIS dan Karang Taruna, stakeholder subject seperti Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, dan stakeholder crowd seperti Bank Lampung.
14.	Septian Rio Bramana (2019)  (Bramana, n.d.)	Mengidentifikasi stakeholder terlibat strategi pengembangan sektor pariwisata Jombang	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Secara garis besar, peran dan strategi secara keseluruhan sudah terimplementasi. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan peran dan strategi tersebut.

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
15.	Aristya Benny Nugroho (2022) (Nugroho. Benny Aristya, 2022)	Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi stakeholder yang terlibat serta peran mereka dalam pengembangan objek wisata Candi Suku.	Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif	Pemangku kepentingan atau stakeholder yang ikut serta antara lain DISPORA, BPCB Jawa Tengah, PHRI Karanganyar, Agent perjalanan wisata dan Masyarakat sekitar Candi Suku. Klasifikasi stakeholder antara lain; stakeholder subject, PHRI, Agent perjalanan wisata dan masyarakat; stakeholder players, DISPORA Karanganyar; stakeholder contest setter, BPCB Jawa Tengah.

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu

Mengacu tabel penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa hasil kajian yang memuat proses menganalisis peran stakeholder dengan memakai sejumlah pendekatan dengan berbagai macam teori dan indikator yang dipakai. Analisis terkait peran stakeholder sebagian besar memakai pendekatan peran dengan teori peran stakeholder dari pendapat ahli yang berbeda, sehingga dalam menganalisis peran stakeholders terdapat indikator atau fenomena yang beragam. Terdapat juga penggunaan teori lain seperti teori identifikasi stakeholder, *collaborative governance*, model jaringan aktor, jejaring kebijakan, stakeholder *mapping*. Metode penelitian yang dipakai juga beragam, seperti deskriptif kualitatif, kuantitatif studikasus, dan campuran.

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan yang diteliti dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait seperti pada penelitian yang dilaksanakan (Handayani & Warsono, 2017) ialah berfokus menganalisis peran stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Selain itu terdapat persamaan teori dan metode yang dipakai yakni teori identifikasi stakeholder, peran stakeholder dan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut ialah lokus penelitian ini yang lebih berfokus menganalisis peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kecamatan Wanareja Cilacap sesuai tujuannya melihat melalui peran stakeholder, berbeda dengan penelitian

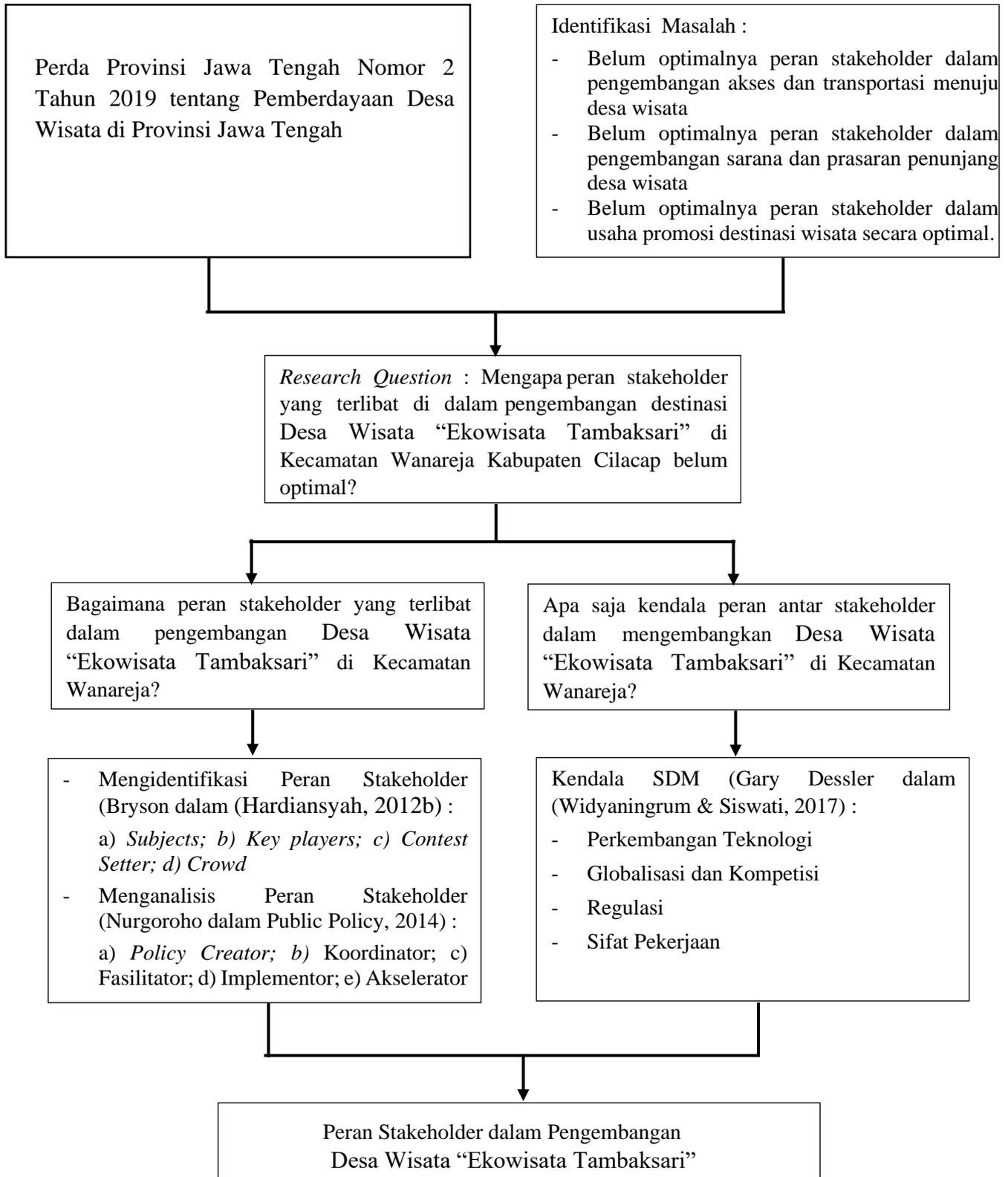
terdahulu yang menganalisis peran stakeholder dalam pengembangan objek wisata Karang Jahe. Perbedaan juga ditunjukkan dalam penggunaan teori kendala peran stakeholders. Penelitian ini menganalisis faktor kendala peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kabupaten Cilacap memakai teori manajemen sumber daya manusia oleh Dessler (Widyaningrum & Siswati, 2017), berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut yang mengidentifikasi kendala peran stakeholder tanpa memakai teori lagi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, teori yang dipilih peneliti guna menganalisis peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kabupaten Cilacap ialah memakai teori peran stakeholder mengacu Nurgroho, dengan lima peran stakeholder yang di analisis, yakni 1) *Policy creator*; 2) Koordinator; 3) Fasilitator; 4) Implementor; 5) Akselerator. Peneliti juga menganalisis faktor kendala peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kabupaten Cilacap dengan menganalisis dua jenis faktor yang dapat menentukan faktor kendala mengacu Sutaryono yakni faktor internal dan faktor eksternal. Peneliti juga memakai metode penelitian deskriptif.

### **1.5.8 Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran dipakai sebagai fondasi dalam melaksanakan pengembangan berbagai konsep dan teori yang diterapkan dalam penelitian, serta bagaimana konsep tersebut terkait dengan pembentukan masalah penelitian. Latar belakang penelitian ini ialah untuk memahami peran pemangku kepentingan dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata "Ekowisata Tambaksari" di Kabupaten Cilacap. Tiap daerah dan desa perlu mengenali potensi yang dimilikinya agar dapat dikembangkan, yang akan membawa manfaat tambahan serta peningkatan produktivitas yang signifikan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Penetapan SK Bupati Cilacap Nomor 556/708/27/Tahun 2020 tentang Penetapan Desa Wisata dan Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Cilacap, tergambar upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan potensi daerahnya. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata di desa tidak hanya diperankan oleh pengelola desa wisata sebagai eksekutor, tetapi juga perlu adanya partisipasi stakeholder lain yang ikut serta berperan. Peran bersama stakeholder yang baik dapat menciptakan inovasi bagi optimalisasi potensi desa. Memajukan potensi desa merupakan langkah awal untuk membentuk ekonomi desa yang kuat. Mengacu pada konsep dan teori yang telah disebutkan diatas, maka kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

## Bagan Kerangka Berpikir



Sumber : Data yang sudah diolah

## **1.6 Fenomena Penelitian**

### **1.6.1 Identifikasi Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”**

Analisis stakeholder dilaksanakan untuk mengungkapkan kepentingan dan pengaruh (peranan) para stakeholder terhadap suatu kebijakan atau program. Peran stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” sangat penting dalam menciptakan inovasi dan memaksimalkan potensi desa yang ada, sehingga perlu adanya identifikasi dan analisis peran stakeholder yang terlibat. Mengacu hal tersebut, guna menjawab rumusan masalah peran stakeholder dalam penelitian Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata ‘Ekowisata Tambaksari’. Dalam mengidentifikasi stakeholder, peneliti menganalisis pengaruh dan kepentingan stakeholder dengan memakai model Siregar (2011) yakni:

#### **a) Pengaruh Stakeholder**

1. Usulan Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata.
2. Kontribusi yang diberikan Stakeholder.
3. Keterlibatan SDM Stakeholder.
4. Dukungan Anggaran yang diberikan Stakeholder
5. Keterlibatan Stakeholder dalam Meningkatkan Daya Tarik Desa Wisata.

#### **b) Kepentingan Stakeholder :**

1. Keterlibatan Stakeholder dalam Management Desa Wisata.
2. Kebermanfaatan Desa Wisata bagi Stakeholder.
3. Penggunaan Wewenang Stakeholder.
4. Komitmen Stakeholder dalam Memprioritas Desa Wisata.

## 5. Hubungan Ketergantungan Stakeholder dalam Desa Wisata.

Tahapan dalam menganalisis stakeholders ialah menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan” (Reed et al., 2009; Thompson, 2011; Gardner et al., 1986) dalam penelitian (Handayani & Warsono. 2017), antara lain :

1. **Subyek (*Subjects*)**. Analisis stakeholder *subjects* dapat diamati melalui :
  - a. Pihak yang berpengaruh dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”
  - b. Pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”
2. **Pemain Kunci (*Key Players*)**. Analisis stakeholder *key players* dapat diamati melalui :
  - a. Pihak yang berpengaruh dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”
  - b. Pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”
3. **Pengikut Lain (*Crowd*)**. Analisis stakeholder *crowd* dapat diamati melalui :
  - a. Pihak yang berpengaruh dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”
  - b. Pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”
4. **Pendukung (*Contest setters*)**. Analisis stakeholder *contest setters*

dapat diamati melalui :

- a. Pihak yang berpengaruh dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”
- b. Pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”

### **1.6.2 Identifikasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata**

#### **“Ekowisata Tambaksari”**

Analisis peran stakeholder dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan menganalisis peranan stakeholder yang terlibat dalam penelitian Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”. Guna menjawab rumusan masalah dalam analisis peran stakeholder, peneliti memakai teori Nugroho (*Public Policy*, 2014) antara lain :

1. **Policy creator.** Peran stakeholder *policy creator* dapat diamati melalui :
  - b. Pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan
  - c. Bentuk keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan
2. **Koordinator.** Peran stakeholder koordinator dapat diamati melalui :
  - a. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata
  - b. Bentuk koordinasi di antara pihak- pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata
3. **Fasilitator.** Peran stakeholder fasilitator dapat diamati melalui :
  - a. Pihak yang memberikan fasilitas dalam pengelolaan desa wisata
  - b. Bentuk fasilitas yang diberikan untuk menunjang pengelolaan desa

wisata

4. **Implementor**. Peran stakeholder implementor dapat diamati melalui :
  - a. Pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan desa wisata
  - b. Upaya yang dilaksanakan dalam pengelolaan desa wisata
5. **Akselerator**. Peran stakeholder akselerator dapat diamati melalui :
  - a. Pihak yang memastikan agar pengelolaan desa wisata terlaksana dengan tepat sasaran
  - b. Bentuk upaya yang dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan desa wisata terlaksana dengan tepat sasaran

### **1.6.3 Kendala Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa**

#### **Wisata “Ekowisata Tambaksari” Kecamatan Wanareja**

##### **Cilacap**

Kendala ialah hambatan atau rintangan yang menghalangi pencapaian tujuan atau kelancaran suatu proses atau aktivitas. Kendala dalam peran stakeholders merujuk pada hambatan atau rintangan yang dapat mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) dalam berperan di suatu organisasi, proyek, atau inisiatif tertentu. Stakeholders merupakan lembaga dan manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seberapa baik SDM dikelola oleh suatu organisasi melalui penerapan manajemen SDM. Guna menjawab rumusan masalah kendala peran stakeholder dalam penelitian Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”, peneliti

memakai teori kendala mengacu Garry Dessler dalam (Widyanigrum, & Siswati, 2017) menyebutkan tantangan atau kendala yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia meliputi :

**1. Perkembangan Teknologi.** Faktor perkembangan teknologi dapat diamati melalui :

- a. Perkembangan teknologi yang dilaksanakan pihak stakeholder dalam mendukung pengelolaan desa wisata.
- b. Bentuk fasilitas yang dipakai pihak stakeholder dalam mendukung perkembangan pengelolaan desa wisata.

**2. Daya Saing SDM Stakeholder.** Faktor daya saing SDM dapat diamati melalui :

- a. Upaya yang telah dilaksanakan stakeholder dalam mendorong daya saing dalam pengelolaan desa wisata.
- b. Strategi yang akan dilaksanakan stakeholder dalam mendorong daya saing dalam pengelolaan desa wisata.

**3. Regulasi yang Mengatur.** Faktor regulasi dapat diamati melalui :

- a. Tingkat pengetahuan pekerja mengenai tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan desa wisata.
- b. Dampak regulasi terhadap tugas, pokok dan fungsi stakeholder dalam mendukung pengelolaan desa wisata.

**4. Kompetensi SDM Stakeholder.** Faktor kompetensi SDM stakeholder dapat diamati melalui :

- a. Upaya yang sudah dilaksanakan pihak stakeholder dalam mendorong

kompetensi SDM

- b. Strategi yang akan dilaksanakan pihak stakeholder dalam mendorong kompetensi SDM

### **1.7 Argumen Penelitian**

Pengembangan desa wisata merupakan strategi yang terintegrasi untuk mempercepat pembangunan desa dengan tujuan merangsang perubahan dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi di desa-desa. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari pengembangan desa wisata ialah untuk menggerakkan desa-desa wisata menuju tingkat kemajuan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, memiliki cakupan wilayah yang luas. Hal ini berlaku bagi desa-desa yang terdapat di Kabupaten Cilacap. Kecamatan Wanareja sebagai satu di antara kecamatan di Kab. Cilacap memiliki potensi di bidang pariwisata yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 556/708/27 Tahun 2020, yakni Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” dengan 5 potensi pariwisata. Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” terletak di antara 200 - 600 mdpl yang termasuk ke dalam dataran tinggi dengan suasana dingin yang sesuai untuk dikembangkan sebagai pariwisata agro

wisata. Namun pengelolaan desa wisata tersebut belum optimal stakeholders terkait ditunjukkan koordinasi stakeholder yang belum efektif, peran stakeholder dalam pengembangan sarana dan prasarana penunjang desa wisata yang belum optimal serta peran stakeholder dalam usaha promosi destinasi wisata belum dilaksanakan secara optimal. Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Kab. Cilacap. Sebagai suatu proses dalam pengembangan kawasan desa wisata dibutuhkan suatu tindakan pemeliharaan yang terbaik menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usahapencapaian tujuan. Potensi dan daya tarik Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” akan memiliki nilai daya tarik yang tinggi jika ditunjang dengan peran pengelola yang tepat. Desa wisata dapat berkembang dengan peran serta partisipasi dari stakeholder yang berkaitan di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menganalisis peranan stakeholder yang terlibat dengan melihat paradigma kebijakan publik sebagai *governance* yang berorientasi pada partisipasi dan kerjasama berbagai jaringan aktor dan mengidentifikasi peranan melalui teori peran stakeholder. Menganalisis indikasi masalah pengembangan desa wisata sebagai permasalahan publik yang didasari oleh implementasi kebijakan pengembangan desa wisata serta menganalisis kendala peran stakeholder dengan memandang teori kendala sumber daya manusia. Peneliti mengambil judul mengenai Analisis Peran Stakeholder dalam

Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” Kecamatan Wanareja Cilacap.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Mengacu ahli Perreault dan McCarthy dalam Tahura (2019) penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang berupaya menelusuri data secara intensif dan terbuka atas semua respon jawaban. Menurut Moleong (2011) berpendapat penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan berupaya mengerti secara mendalam dan keseluruhan mengenai kejadian yang dialami subjek penelitian, dengan mendeskripsikan ke dalam bahasa dan memakai metode ilmiah. Selanjutnya mengacu Sugiyono (2012), Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang mengarahkan peneliti untuk mempelajari subjek atau objek secara alami. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, yang dilaksanakan secara induktif dengan memakai teknik triangulasi. Hasil penelitian yang dihasilkan lebih menekankan pada pemahaman makna dibandingkan dengan generalisasi.

Mengacu beberapa definisi terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ialah serangkaian aktivitas dengan tujuan guna mencari dan mendapatkan data mendalam dengan hasil lebih memfokuskan terhadap makna. Pada penelitian ini,

metode yang dipakai oleh peneliti ialah metode deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan dalam rangka mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Pada penelitian ini, situs penelitian dilaksanakan di Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini, penentuan informan didasarkan pada peran utama yang dimainkan oleh Ketua Pokdarwis sebagai stakeholder kunci dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”. Prosedur pemilihan subjek penelitian memakai dua metode, yakni teknik *purposive sampling*, yang berarti pemilihan sampel dilaksanakan dengan pertimbangan khusus selaras pada kriteria tertentu dalam (Sugiyono, 2016), dan metode *snowball sampling*, yang melibatkan penggunaan informan kunci sebagai pendorong dalam proses pengambilan sampel.

Stakeholder yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Pihak yang menjadi informan kunci ialah Ketua Pokdarwis, Kepala Desa Tambaksari, Kepala DISPORAPAR Kabupaten Cilacap, Kepala

Koordinator Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata DISPORAPAR, Ketua PKK ANNUR TEFA dan Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata

#### **1.8.4 Jenis Data**

Penelitian ini memakai jenis data kualitatif, yang terdiri dari informasi yang diungkapkan melalui kata-kata, kalimat, skema, dan gambar.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Pada penelitian ini, sumber data bersumber mengacu data primer dan data sekunder yakni:

- 1) Data Primer. Data primer yakni hasil data yang bersumber dan didapatkan secara langsung dari subjek/objek penelitian oleh peneliti. Data yang didapatkan pada penelitian ini ialah data langsung dari Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
- 2) Data Sekunder. Data sekunder yakni hasil data yang didapatkan tidak langsung dari subjek/objek penelitian. Peneliti mendapatkan data tersebut dari data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh orang lain. Data ini didapatkan dengan cara mengambil data dari buku, artikel jurnal, artikel berita, serta dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian mengacu pada

data yang telah didapatkan, oleh karena itu data merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, data didapatkan melalui berbagai sumber, pengumpulan data melalui teknik yang beragam, dan dilaksanakan secara berulang kali. Mengacu atas jenis data yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data melalui Teknik :

1) Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas mendapatkan data yang bertujuan guna mendapatkan data penelitian melalui bertanya secara langsung terhadap responden/informan dengan berpedoman terhadap panduan wawancara. Peneliti mencatat semua tanggapan responden/informan tanpa mengubah. Model wawancara yang dipakai pada penelitian ini ialah wawancara semi-terstruktur, yakni panduan melaksanakan wawancara yang dilaksanakan untuk mendapatkan inti masalah secara lebih terbuka, dengan meminta menceritakan apa yang diketahui, pendapat, ide, maupun gagasan secara mendalam. Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara terhadap Kepala DISPORAPAR Kabupaten Cilacap, Koordinator Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata DISPORAPAR Kabupaten Cilacap, Koordinator Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif DISPORAPAR Kabupaten Cilacap, para

staf pegawai bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata DISPORAPAR Kabupaten Cilacap, Kepala Desa Kecamatan Wanareja, Ketua POKDARWIS Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari”.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan dokumen yang berhubungan dengan topik dan masalah penelitian. Hasilnya kemudian dianalisis secara terus menerus agar menjadi pendukung dan pembuktian masalah penelitian. Aktivitas dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan transkrip, catatan, dan beberapa dokumen lain yang berhubungan dengan peran stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kecamatan Wanareja. Selain itu, dilaksanakan pengambilan beberapa foto/gambar yang dapat mendukung hasil dari wawancara dan observasi seperti dengan mengambil foto mengenai kegiatan penyelenggaraan desa wisata yang sedang berlangsung di Kecamatan Wanareja beserta dengan

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data melibatkan sistematisasi data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Data dikumpulkan, dikelompokkan, dideskripsikan, disintesis, dan disusun ke dalam kategori yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Mengacu (Miles 2014)

proses analisis data kualitatif dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas memilah, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah bentuk data-data dari hasil pengumpulan data, agar data tersebut dapat memberikan representasi yang lebih jelas atas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari penelitian.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan data dan informasi yang telah disusun untuk membantu menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Pada penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, dan lain-lain. Data yang disajikan dengan baik akan memudahkan peneliti dalam memahami makna dan informasi atas data tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas membuat simpulan pada data yang telah disajikan menjadi lebih bermakna lebih umum, namun tetap melaksanakan pembatasan pada ruang lingkup studi penelitian yang telah di tentukan agar tidakterlalu meluas dan dapat isi penelitian.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Mengetahui keabsahan atau validitas data penelitian perlu dilaksanakan pengecekan sesuai dengan kriteria tertentu. Untuk memastikan kevalidan data penelitian ini, dipakai teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan penggunaan metode lain atau sumber lain selain data yang telah dikumpulkan untuk memverifikasi dan membandingkan hasil penelitian. Teknik triangulasi penelitian ini memakai triangulasi sumber data dengan membandingkan data dari sumber yang berbeda. Untuk mendapatkan kebenaran data yang andal dan gambaran yang utuh mengenai analisis peran stakeholder pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kecamatan Wanareja, peneliti memakai perbandingan sumber data primer dan sekunder, hasilnya akan dapat ditarik kesimpulan terkait analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.